



Kapasitas Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Sinabung Melalui Pendistribusian Jaminan Hidup Dan Isian Hunian Tetap Masyarakat Desa Berastepu

Septiana Br Sembiring¹⁾; Rudi Kristian P. M²⁾

¹⁾ Student of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra

²⁾ Lecturer of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra

Email: ¹⁾ septianasmb@gmail.com ; ²⁾ rudimanurung@usu.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [115 November 2022]

Revised [30 November 2022]

Accepted [19 Desember 2022]

KEYWORDS

Capacity, Disaster, Disaster Management.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana kapasitas Dinas Sosial dalam penanggulangan erupsi Gunung Sinabung melalui pendistribusian jaminan hidup dan isian hunian tetap masyarakat desa Berastepu. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian di lapangan, peneliti menemukan bahwa kapasitas Dinas Sosial dalam penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung melalui pendistribusian jaminan hidup dan isian hunian tetap masyarakat desa Berastepu belum maksimal. Dinas Sosial telah mendistribusikan bantuan bagi masyarakat Desa Berastepu, namun masih terdapat masalah dilihat dari indikator sumber daya manusia yang belum maksimal dimana latar belakang pendidikan pegawai tidak sesuai dengan penempatan jabatan, kemudian sarana dan prasarana khususnya ruangan kerja yang belum memberikan kenyamanan bagi pegawai, dan indikator manajemen organisasi khususnya pengumpulan informasi belum maksimal dimana terdapat tertinggalnya sebagian data masyarakat sehingga mengakibatkan terlambatnya pendistribusian bantuan.

ABSTRACT

This study aims to find out and describe how the capacity of the Social Service in overcoming the eruption of Mount Sinabung through the distribution of life insurance and the filling of permanent housing for the people of Berastepu village. The method used is a descriptive method with a qualitative approach through data collection such as interviews, observations, documentation, and literature studies. The results of research in the field, researchers found that the capacity of the Social Service in disaster management of the Mount Sinabung eruption through the distribution of life insurance and the filling of permanent housing for the berastepu village community has not been maximized. The Social Service Office has distributed assistance to the people of Berastepu Village, but there are still problems seen from human resource indicators that have not been maximized where the employee's educational background is not in accordance with the placement of positions, then facilities and infrastructure, especially work rooms that have not provided comfort for employees, and organizational management indicators, especially information collection, have not been maximized where there is a lag in some community data so that resulting in late distribution of aid.

PENDAHULUAN

Peristiwa yang ditimbulkan oleh gejala alam maupun yang diakibatkan oleh kegiatan manusia dapat disebut bencana ketika manusia yang terkena dampak oleh peristiwa itu tidak mampu untuk menanggulangnya (Nurjanah dkk, 2013: 13). Gunung Sinabung merupakan salah satu dari beberapa gunung di Indonesia yang aktif dan menunjukkan aktivitas vulkanik. Lokasi Gunung Sinabung secara administratif termasuk dalam daerah Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. Dalam PerBup Karo tahun 2018, sejak letusan pertama pada 27 Agustus 2010, Gunung Sinabung mengeluarkan erupsi secara aktif dan pada tahun 2013 status Gunung Sinabung naik ke level awas dan berdasarkan rekomendasi vulkanologi penduduk 21 Desa dan 2 Dusun di sekitaran Gunung Sinabung diungsikan ke 24 titik posko pengungsian yang ada di Kabupaten Karo. Bencana Gunung Sinabung tentunya membutuhkan perhatian dan peran dari pemerintah, bukan hanya pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah dan jajarannya. Dalam kondisi ini pemerintah harus bisa mengambil langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah bencana gunung Sinabung dengan sebaik-baiknya agar dapat mengurangi dampak atau resiko bagi masyarakat dan dapat segera memberikan bantuan pemulihan bagi masyarakat. Keterlibatan Dinas Sosial dalam penanggulangan bencana erupsi gunung Sinabung cukup

penting perannya karena menangani masalah sosial masyarakat korban bencana yaitu memberikan bantuan jaminan sosial dan bantuan isi hunian tetap. Sesuai dengan tugasnya, Dinas Sosial telah melaksanakan pendistribusian jaminan hidup dan isian hunian tetap khususnya bagi masyarakat relokasi mandiri yaitu masyarakat yang berasal dari Desa Kuta Tonggal, Desa Gamber, Desa Gurukinayan, dan Desa Berastepu. Berdasarkan data dari Dinas Sosial juga diketahui telah diberikan 1.657 KK untuk isian hunian tetap dan sebanyak 5.102 jiwa untuk jaminan hidup bagi masyarakat yang ikut dalam relokasi mandiri. Namun masih terdapat masalah mengenai penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung oleh Dinas Sosial yaitu terlambatnya bantuan Jadup dan Huntap bagi sebagian masyarakat. Seperti yang diterbitkan oleh (orbitdigitaldaily.com, 2021) menuliskan bahwa bantuan stimulan usaha tani dan bantuan pendampingan sosial ekonomi seperti bantuan isian rumah dan jatah hidup (jadup) juga belum pernah diterima sejak penyerahan rumah pada tahun 2019, dan juga di setujui oleh beberapa masyarakat Desa Berastepu yang menyatakan bahwa mereka belum menerima bantuan tersebut sampai saat ini. Sehingga untuk melihat lebih jelas mengenai kapasitas Dinas Sosial dalam penanggulangan bencana erupsi gunung Sinabung maka sesuai dengan yang dikatakan oleh Fiszbein (1997: 1031) bahwa untuk mengetahui kapasitas suatu organisasi dapat melalui tiga dimensi yaitu tenaga kerja, sarana prasarana, dan juga manajemen organisasi.

LANDASAN TEORI

Kapasitas Organisasi

Milen (2004: 12) merumuskan pengertian kapasitas sebagai kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efisien, efektif, dan terus menerus. Vangermeersch (1998: 21) menyatakan bahwa kapasitas organisasi dilihat sebagai kemampuan dari organisasi untuk menciptakan nilai dimana kemampuan tersebut berasal dari berbagai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Ingraham (dalam Bryan, 2011: 8) juga menyatakan bahwa kapasitas organisasi berkaitan dengan sejauh mana organisasi mampu memiliki sumber daya yang tepat ditempat dan diwaktu yang tepat, dengan kata lain, organisasi harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dimana organisasi itu berada.

Dari beberapa pengertian kapasitas organisasi yang telah diungkapkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kapasitas organisasi merupakan kemampuan atau potensi sebuah organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya menggunakan berbagai sumber daya dan keterampilan yang dimilikinya seperti sumber daya manusia, anggaran, teknologi, sarana, dan prasarana.

Model Kapasitas Organisasi Fiszbein

Dalam melihat sebuah kapasitas organisasi, terdapat dimensi-dimensi yang digunakan menurut Fiszbein:

1. Labor, a key dimension of local government capacity is the quality of its staff, which we view as a function of their skill and knowledge as well as of the way such skill are utilized within the local bureaucratic structure, to which we will refer as staff professionalization. It is the combination of skills and profesionalization that determine staff quality.
2. Capital, most public sector activities require the use of capital in addition to labor. High quality labor could become ineffective when, for example, working in run-down buildings or without access to the necessary equipment.
3. Technology, this third dimension of local capacity consists of the government's internal organization and management style. This dimension includes aspects related to: structure and distribution of functions and responsibilities within the organization: management, planning, decision-making and control and evaluation functions; and information gathering, processing and distribution.

Bencana

UNDP (dalam Adiyoso, 2018: 20) memberikan definisi bencana merupakan fenomena yang terjadi karena komponen-komponen ancaman dan kerentanan bekerjasama secara sistematis yang didorong oleh pemicu sehingga menyebabkan terjadinya resiko bencana pada komunitas. Dikatakan sebagai bencana apabila manusia tidak dapat menanggulangnya. Menurut Pery (dalam Kusumasari 2014: 5) menyatakan bencana sebagai kejadian tidak rutin yang terjadi ketika masyarakat atau subsistem masyarakat yang lebih besar terganggu secara sosial dan mengalami kerugian secara fisik.



Berdasarkan dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bencana adalah segala kejadian atau peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi manusia yang berupa kerugian fisik maupun kerugian non-fisik baik disebabkan oleh alam maupun non-alam. Bencana juga merupakan segala peristiwa yang datang secara tiba-tiba sehingga manusia tidak dapat merencanakan penanggulangannya dengan baik.

Penanggulangan Bencana

Manajemen bencana atau penanggulangan bencana adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bencana beserta segala aspek yang berkaitan dengan bencana, terutama resiko bencana dan bagaimana menghindari risiko bencana (Nurjanah dkk, 2013: 42). Manajemen bencana sangat diperlukan agar dapat mengurangi dampak dari adanya bencana sehingga bencana akan dapat dikelola dengan lebih baik untuk meminimalisir kerugian fisik maupun materi. Selanjutnya pengertian penanggulangan bencana menurut Nurjanah dkk (2013: 25) menyatakan bahwa Penanggulangan bencana atau manajemen bencana merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan pada sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana yang bertujuan untuk mencegah kehilangan jiwa, mengurangi penderitaan manusia, memberi informasi masyarakat dan pihak berwenang mengenai resiko, dan mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda dan kehilangan sumber ekonomis. Berdasarkan pengertian manajemen bencana diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen bencana adalah upaya yang dilakukan untuk meminimalisir akibat dari adanya sebuah bencana agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi manusia. Manajemen bencana sangat diperlukan untuk menghadapi sebuah bencana, sesuai dengan yang dikatakan dalam Nurjanah dkk (2013: 39) bahwa besarnya bencana tergantung dari perbedaan tingkat kerentanan masyarakat dalam menghadapi bahaya atau ancaman bencana.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai bidang tertentu, baik berupa keadaan, permasalahan, sikap, pendapat, kondisi, prosedur atau sistem secara faktual dan cermat. Menurut Moleong (2016: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam sebuah penelitian, karena penelitian mempunyai tujuan utama yaitu salah satunya mendapatkan data. Maka, peneliti harus bisa mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Itulah sebabnya menyusun instrumen pengumpulan data harus ditangani secara serius agar memperoleh hasil yang sesuai. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data primer yaitu data diperoleh langsung di lokasi penelitian dan teknik pengumpulan data sekunder yaitu dilakukan dengan beberapa cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi Kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Sosial Kabupaten Karo merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang perannya cukup penting dalam penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung. Dinas Sosial bertugas untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat korban bencana erupsi Sinabung mulai dari tahap pra bencana hingga tahap pasca bencana. Dengan adanya bantuan sosial bagi korban bencana maka diharapkan dapat mendukung penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung dan hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan penyelamatan bagi masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal melalui pemulihan kondisi sosial setelah terjadinya bencana.

Untuk melaksanakan tugas organisasi dengan baik maka diperlukan kapasitas organisasi yang baik juga, oleh karena itu untuk melihat kapasitas Dinas Sosial Kabupaten Karo dalam mendukung penanggulangan bencana dapat dilihat dari dimensi penilaian kapasitas organisasi menurut Fiszbein yaitu dari tenaga kerja, sarana prasarana, dan manajemen organisasi.

Tenaga Kerja

Variabel pertama dan utama penilaian kapasitas menurut Fiszbein adalah tenaga kerja, kapasitas organisasi sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Sumber daya manusia merupakan penentu bagi berjalannya kegiatan organisasi semakin baik kualitas staff maka semakin baik pula kinerja organisasi karena segala aspek dalam organisasi memerlukan sumber daya manusia yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Kapasitas tenaga kerja ini dapat ditinjau dari kualitas sumber daya manusia berupa keterampilan dan pengetahuan pegawai, selanjutnya selain dari segi kualitas, tenaga kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Karo juga dapat ditinjau dari segi kuantitas.

Dari segi Kualitas, Dinas Sosial memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas agar pendistribusian bantuan tersebut dapat berjalan dengan efektif. Fiszbein (1997) menyatakan bahwa untuk melihat kapasitas pegawai dapat dilihat dari kemampuan dan keterampilan pegawai dalam organisasi. Selanjutnya ditambahkan oleh Raharjo (2012) yang menyatakan bahwa kualitas SDM dalam organisasi dapat ditentukan dari pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai dalam organisasi. Maka dapat dikatakan bahwa untuk melihat kualitas sumber daya manusia dalam organisasi dapat dinilai dari kemampuan dan pendidikan pegawai.

Berdasarkan penelitian dilihat bahwa latar belakang pendidikan pegawai Dinas Sosial Kabupaten Karo sebagian besar tidak sesuai dengan jabatan atau penempatan kerja, khususnya dalam bidang yang menangani bantuan kepada korban bencana. Selanjutnya dari segi kuantitas, kuantitas pegawai juga cukup penting dalam organisasi untuk menjalankan tanggungjawab organisasi. Dengan tercukupinya jumlah pegawai tentunya akan dapat membuat pegawai melakukan pekerjaan dengan lebih maksimal. Untuk mengetahui mengenai kuantitas pegawai Dinas Sosial penulis melakukan wawancara dengan oleh Bapak Indra Sebayang S.H selaku sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Karo yang menyatakan bahwa kuantitas pegawai Dinas Sosial masih belum memadai khususnya untuk kerja lapangan, dan hal tersebut juga didukung oleh pendapat Ibu Sondang Julia Nova, SE sebagai kepala sub bagian umum dan kepegawaian Dinas Sosial dan oleh Ibu Elly Br Perangin-angin, SP sebagai Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Berdasarkan observasi peneliti melihat dan mendengarkan bahwa kuantitas sumber daya manusia di Dinas Sosial Kabupaten Karo dapat dikatakan memang masih belum cukup secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan pegawai dalam mengisi jabatan struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Karo, dimana terdapat adanya dua jabatan dalam struktur organisasi yang belum terisi saat ini yaitu jabatan kepala seksi pemberdayaan keluarga, kelembagaan sosial dan komunitas adat terpencil dan jabatan kepala seksi kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial. Namun khusus dalam penanganan bantuan jaminan hidup dan isi hunian tetap masyarakat korban bencana yaitu di bidang perlindungan dan jaminan sosial dilihat bahwa kuantitas sumber daya manusia di bidang tersebut sudah dapat dikatakan memadai dimana setiap jabatan dalam bidang tersebut sudah ditempati oleh masing-masing pegawai. Selanjutnya pegawai juga dibantu oleh adanya TAGANA atau taruna siaga bencana yang saat ini di Dinas Sosial Kabupaten Karo berjumlah 60 orang.

Capital (Sarana dan Prasarana)

Sarana dan prasarana dalam organisasi juga tidak kalah penting, Fiszbein menyatakan bahwa sebagian besar aktivitas sektor publik selain tenaga kerja yang berkualitas, ketersediaan sarana dan prasarana juga sangat dibutuhkan. Sarana dan prasarana diperlukan untuk menunjang dan mendukung pegawai untuk melakukan tugasnya dengan efektif dan efisien karena pada dasarnya fungsi sarana dan prasarana adalah untuk memudahkan atau dapat menyederhanakan pekerjaan pegawai.

Dinas Sosial Kabupaten Karo sebagai instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi yang penting bagi masyarakat khususnya dalam penanggulangan bencana harusnya memiliki



ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat memudahkan pekerjaan pegawai dan juga dapat memberi rasa nyaman bagi pegawai dan juga masyarakat yang berkepentingan.

Berdasarkan observasi peneliti di Dinas Sosial Kabupaten Karo peneliti melihat dan mendengarkan bahwa peralatan Dinas Sosial sudah cukup lengkap di mana sudah tersedia berbagai peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk menunjang kinerja pegawai, khususnya juga dalam penanganan jaminan hidup dan isian hunian tetap dilihat sudah baik terkait peralatan seperti laptop untuk menginput data calon penerima bantuan, selanjutnya ruangan untuk melaksanakan pelayanan bagi masyarakat juga sudah cukup nyaman, juga kondisi ruangan yang bersih dan dilengkapi dengan tanaman hias yang berguna untuk menambah rasa nyaman bagi masyarakat. Selanjutnya untuk prasarana seperti gedung dan ruangan dinilai memang sesuai dengan pernyataan pegawai bahwa masih kurang maksimal untuk memberikan rasa nyaman bagi para pegawai dilihat dari ruangan yang kurang luas.

Technology (Organisasi Internal dan Manajemen Organisasi)

Dimensi ketiga dari penilaian kapasitas organisasi menurut Fiszbein adalah organisasi internal dan manajemen organisasi. Untuk melihat kapasitas Dinas Sosial Kabupaten Karo dalam mendistribusikan bantuan jaminan hidup dan isian hunian tetap masyarakat korban bencana salah satunya adalah dengan melihat bagaimana organisasi internal dan manajemen organisasi yang ada di Dinas Sosial, dimana untuk mengetahui hal tersebut dapat dilihat dari struktur organisasi, distribusi fungsi dan tanggung jawab dalam organisasi dan untuk manajemen organisasi dapat dilihat dari perencanaan, evaluasi, dan pengumpulan informasi, pengolahan, dan distribusi.

Pertama, struktur organisasi, untuk melihat dan mengetahui struktur organisasi di Dinas Sosial Kabupaten Karo apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Karo No 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo No 04 Tahun 2017, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yaitu Bapak Indra Sebayang, SH sebagai sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Karo menyatakan bahwa struktur organisasi Dinas Sosial sudah sesuai dan mengikuti peraturan yang berlaku.

Kedua, distribusi fungsi atau distribusi tugas pegawai. Distribusi fungsi dan tanggungjawab instansi pemerintah daerah Kabupaten Karo diatur dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo. Untuk mengetahui bagaimana distribusi fungsi dan tanggungjawab pegawai Dinas Sosial maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan seperti Bapak Indra Sebayang, SH sebagai sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Karo, menyatakan bahwa semua pegawai sudah diberikan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan jabatannya masing-masing.

Ketiga, perencanaan, Perencanaan adalah fungsi manajemen yang paling dasar dan terpenting karena perencanaan dinilai sebagai langkah awal yang akan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Dinas Sosial Kabupaten Karo sebagai salah satu instansi pemerintah daerah yang ikut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana Gunung Sinabung tentunya membutuhkan perencanaan yang baik agar bantuan tersebut dapat didistribusikan dengan baik. Untuk hal ini, peneliti melihat dan mendengarkan bahwa Dinas Sosial sudah melakukan perencanaan dengan baik dengan melakukan rapat dengan pihak-pihak yang terkait seperti pemerintahan desa dan pihak bank untuk membicarakan mengenai tugas masing-masing.

Keempat, evaluasi, Evaluasi atau dikenal dengan penilaian kinerja pegawai dalam organisasi publik merupakan hal yang penting dalam pengembangan dan produktivitas pegawai. Dinas Sosial Kabupaten Karo sebagai instansi pemerintah juga memerlukan evaluasi atau penilaian kinerja pegawai. Dalam hal ini peneliti melihat dan mendengarkan bahwa pegawai Dinas Sosial setiap tahunnya melakukan evaluasi kinerja pegawai yang disebut dengan sasaran kerja pegawai. Para pegawai dinilai langsung oleh atasannya sesuai dengan jabatannya. Pegawai akan menyerahkan penilaian diri dan jika sesuai maka akan disetujui atasan dan jika tidak dianggap sesuai maka atasan akan memberitahukan dan direkomendasikan untuk melakukan perbaikan. Evaluasi atau penilaian ini menurut peneliti mampu

memberikan dorongan kepada pegawai untuk melakukan tugasnya dengan baik karena akan dilakukan penilaian atas kinerjanya setiap akhir tahun.

Kelima, pengumpulan informasi, pengolahan dan distribusi, Dalam pendistribusian jaminan hidup dan isian hunian tetap masyarakat korban bencana khususnya masyarakat Desa Berastepu memerlukan kontribusi dari pihak lain seperti pemerintahan desa. Dinas Sosial memerlukan informasi mengenai jumlah masyarakat korban bencana yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial berupa jaminan hidup dan isian hunian tetap untuk segera dilakukan rekomendasi. Pengumpulan dan pengolahan informasi sangat penting dalam proses pengajuan bantuan bagi masyarakat karena informasi mengenai data calon penerima harus didapatkan dengan tepat agar tidak terjadi tidak meratanya pendistribusian bantuan kepada masyarakat. Dalam hal ini, diketahui bahwa Dinas Sosial dalam pengumpulan data mengalami kendala mengenai jumlah korban bencana yang mengakibatkan sebagian masyarakat korban bencana erupsi gunung Sinabung khususnya masyarakat desa Berastepu belum mendapatkan bantuan jaminan hidup dan isian hunian tetap sampai sekarang. Adanya kendala tertinggalnya sebagian data masyarakat desa Berastepu pada pengusulan pertama mengakibatkan belum terdistribusinya bantuan tersebut hingga saat ini. Dinas Sosial Kabupaten Karo harus mengulangi proses pengusulan mulai dari tahap pertama bagi masyarakat korban bencana termasuk juga masyarakat desa Berastepu yang tertinggal pada pengusulan sebelumnya. Hal inilah yang mengakibatkan terdapat masyarakat yang belum menerima bantuan sampai saat ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Dinas Sosial Kabupaten Karo mengenai kapasitas Dinas Sosial dalam penanggulangan bencana melalui pendistribusian jaminan hidup dan isi hunian tetap masyarakat Desa Berastepu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Labor* (Tenaga Kerja)

Kapasitas sumber daya manusia di Dinas Sosial Kabupaten Karo masih belum cukup maksimal khususnya dalam hal kualitas sumber daya manusia, dilihat dari latar belakang pendidikan pegawai masih belum sesuai dengan penempatan jabatan sehingga kinerja pegawai dalam organisasi kurang maksimal dan efektif.

2. *Capital* (Sarana dan Prasarana)

Kapasitas Dinas Sosial Kabupaten Karo dalam hal sarana dan prasarana belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari keadaan ruang kerja yang belum memberikan rasa nyaman bagi pegawai untuk melakukan tugas dengan baik.

3. *Technology* (Organisasi Internal dan Manajemen Organisasi)

Pada indikator ini dapat dinilai dari organisasi internal yaitu struktur organisasi dan distribusi fungsi dan tanggungjawab dalam organisasi, selanjutnya manajemen organisasi yaitu perencanaan, evaluasi, dan pengumpulan informasi, pengolahan, dan distribusi. Kapasitas Dinas Sosial Kabupaten Karo dalam indikator *technology* ini khususnya pengumpulan informasi masih belum cukup baik karena terdapat masalah dalam pengumpulan informasi terkait jumlah calon penerima bantuan korban bencana yang mengakibatkan sebagian masyarakat desa Berastepu belum mendapatkan bantuan jaminan hidup dan isi hunian tetap sampai saat ini.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:



1. Berkaitan dengan SDM, untuk meningkatkan kapasitas organisasi, selanjutnya diharapkan adanya peningkatan standar kualitas persyaratan CPNS khususnya dalam hal kesesuaian latar belakang pendidikan dengan jabatan pegawai agar pegawai lebih maksimal dalam organisasi.
2. Berkaitan dengan sarana dan prasarana, diharapkan adanya penambahan dan pembaruan fasilitas agar memberikan kenyamanan bagi pegawai dan masyarakat, karena sarana dan prasarana merupakan hal penting dalam menunjang kinerja pegawai.
3. Berkaitan dengan organisasi internal dan manajemen organisasi, Dinas Sosial diharapkan lebih teliti dalam pengumpulan dan pengolahan informasi agar tidak terjadi kesalahan dalam jumlah masyarakat korban bencana penerima bantuan jaminan hidup dan isian hunian tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyoso, W. (2018). *Manajemen bencana pengantar & isu-isu strategis*. Jakarta: Bumi Aksara.
bnpb.go.id. *Definisi bencana*. Diakses pada 19 April 2021, dari <https://bnpb.go.id/definisi-bencana>
- Bryan, T, K. (2011). *Exploring the dimensions of organizational capacity for local social service delivery organizations using a multi-method-approach*.
- Christensen, R, K. (2008). *Capacity for public administration: analysis of meaning and measurement*. Public Administration and Development. Vol 28 (4), 265-279.
- Fiszbein, Ariel. (1997). *The emergence of local capacity: lessons from Colombia*. *World Development*, vol. 25 (7), 1029-1043.
- Kaplan, A. (1999). *The developing of capacity*. Community Development Resource Association.
karokab.go.id. *Hanya 21 Desa dan 2 Dusun yang direkomendasikan untuk diungsikan*. Diakses pada 26 April 2021, dari <https://www.karokab.go.id/id/covid-19/107-gunung-sinabung/status-tanggap-darurat-erupsi-gunung-sinabung/1494-hanya-21-desa-dan-2-dusun-yang-direkomendasikan-untuk-diungsikan>
- Khambali, I. (2017). *Manajemen penanggulangan bencana*. Yogyakarta: Andi Offset.
- kompas.com. (2020). *Gunung sinabung erupsi, ini sejarah letusannya dalam 5 tahun terakhir*. Diakses pada 28 April 2021, dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/10/161500865/gunung-sinabung-erupsi-ini-sejarah-letusannya-dalam-5-tahun-terakhir?page=all#page2>
- Kusumasari, B. (2014). *Manajemen bencana dan kapabilitas pemerintah lokal*. Yogyakarta. Gava Media.
- Milen, A. (2004). *Pegangan dasar pengembangan kapasitas*. (diterjemahkan secara bebas). Yogyakarta: Pembaruan.
- Moleong, L, J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurjanah., Sugiharto, R., Kuswanda, D., BP, Siswanto., Adikoesoemo. (2013). *Manajemen bencana*. Bandung: Alfabeta.
- orbitdigitaldaily.com. (2021). *Bantuan pemerintah untuk pengungsi sinabung diduga tidak sesuai juknis*. Diakses pada 21 April 2021, dari <https://www.orbitdigitaldaily.com/bantuan-pemerintah-untuk-pengungsi-sinabung-diduga-tidak-sesuai-juknis/>
- Peraturan Bupati Karo No 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah.
- Peraturan Bupati Karo No 39 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana.
- Raharjo, M, D. (2012). *Intelektual, intelegensia, dan perilaku politik bangsa*. Bandung: Mizan.
- Soeprapto, Riyadi MS. (2010). *The capacity building for local government toward good governance*. World Bank.
- Solong, A., Asri, Y. (2021). *Kajian teori organisasi dan birokrasi dalam pelayanan publik*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana..

Vangermeersch, M, R. (1998). *Total capacity management optimizing at the operational, tactical, and strategic levels*. New York: CRC Press.